



## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Banten  
Dari : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten  
Tembusan : Yth. Bapak Wakil Gubernur Banten  
                  Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten  
                  Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Tanggal : April 2018  
Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Laporan Hasil Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU XVIII Tahun 2018 di Provinsi Lampung.**

---

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Sekretariat Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Nomor : 130/-072.34/MPU/III/2018 Tanggal 05 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU XVIII Tahun 2018 dan Surat Pjs. Gubernur Lampung Nomor : 005/0513/01/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU XVIII Tahun 2018, dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Kerja Gubernur tersebut sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU XVIII Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Maret 2018 bertempat di Swiss Bell Hotel Lampung, Jl. H. R. Rasuna Said No. 18 Bandar Lampung-Provinsi Lampung, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri mewakili Menteri Dalam Negeri dan ditutup oleh Wakil Gubernur Banten.
2. Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU XVIII Tahun 2018 dihadiri oleh para Gubernur Provinsi anggota FKD-MPU atau yang mewakili, Asisten Pemerintahan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas/Badan terkait, Kepala Biro Pemerintahan, Kabag dan Kasubag yang menangani Kerjasama, dan Sekretariat Bersama FKD-MPU.
3. Rangkaian Acara Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU XVIII Tahun 2018 meliputi :
  - a. Diskusi Panel dan Dialog Interaktif dengan tema “**Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Kerjasama Melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU**” dengan narasumber dari :
    - Kementerian Komunikasi dan Informatika
    - Kementerian Pariwisata
    - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    - Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kesimpulan Diskusi Panel dan Dialog Interaktif tersebut sebagai berikut :

- Dalam rangka menuju *digital society*, penerapan e-government dalam semua tingkatan pemerintahan saat ini mutlak dilakukan, e-government hendaknya menjadi bagian keseharian diseluruh aspek kehidupan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat dan terciptanya masyarakat Indonesia masa depan yang aktif berinovasi.
- Pada bidang Pariwisata, penerapan Digital Tourism (E-Tourism) dengan *branding* Wonderful Indonesia mampu menempatkan pariwisata sebagai penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling mudah serta murah. *Country Branding* Wonderful Indonesia yang semula tidak masuk ranking *branding* di dunia, pada tahun 2015 melesat lebih dari 100 peringkat menjadi ranking 47, mengalahkan *country branding* Truly Asia Malaysia di posisi ranking 96.
- Pada bidang Ketahanan Pangan, untuk mengurangi bahan baku impor perlu adanya integrasi data digital potensi masing-masing daerah. Dengan integrasi data digital tersebut, potensi dan kebutuhan daerah akan dengan mudah diketahui, dengan demikian daerah yang surplus segera dapat mengisi daerah yang minus. Sistem integrasi data digital ini dapat sebagai solusi untuk mendukung Indonesia *incorporated* guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pembahasan dan Penandatanganan Kebijakan Program Kerjasama FKD-MPU Tahun 2019, sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan Bersama Gubernur anggota FKD-MPU tentang Penanganan Bersama Warga Binaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 2) Kesepakatan Bersama Gubernur anggota FKD-MPU tentang Integrasi Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah Anggota Mitra Praja Utama.
- 3) Kesepakatan Bersama Gubernur anggota FKD-MPU tentang Pembentukan Pusat Tourism, Trade, Investment Mitra Praja Utama di Jakarta.

c. Kelompok Teknis membahas dan menyusun usulan kegiatan kerjasama dengan berpedoman pada Kebijakan Program Kerjasama FKD-MPU Tahun 2019 yang ditetapkan Gubernur, serta kerjasama yang bersifat lanjutan. Kelompok Teknis ini terbagi dalam tiga kelompok yakni :

- 1) Kelompok I : Tourism, Trade and Investment (TTI)
- 2) Kelompok II : Ketahanan Pangan
- 3) Kelompok III : Sosial dan Kemasyarakatan

4. Sehubungan para Gubernur berhalangan hadir pada Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU tersebut, Kesepakatan Bersama Gubernur terkait Kebijakan Program Kerjasama FKD-MPU Tahun 2019 akan diajukan kemudian oleh Sekretariat Bersama untuk mendapatkan tandatangan seluruh Gubernur anggota FKD-MPU.

Demikian kami laporkan, mohon menjadi periksa dan diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,**



**GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si**

NIP. 19741004 199402 1 002

